

## **Megawati Soekarno Putri Government Policy In Dealing With The Effects Of The Bali Bombings I In 2002**

David Hidayah<sup>1</sup>, Marjono<sup>2</sup>, Sumardi<sup>3</sup>, Nurul Umamah<sup>4</sup>, Riza Afita  
Surya<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>History Education, Universitas Jember

Email: davidhidayah23@gmail.com

### **Abstract**

The Bali Bombing I in 2002 was one of the events caused by terrorists in Indonesia. Terror acts carried out in the Bali region with bombings killed 202 people. The incident occurred when the Indonesian government did not yet have laws and regulations governing the handling of explosions. The Bali Bombing I had a wide impact on the world of Bali tourism. The explosion destroyed the Paddy's Pub cafe, Sari Club and the United States Consulate. More than 519 people were recorded, consisting of 202 people died and 317 people were outpatient. The Bali Bombing I caused many problems that had to be handled by the Megawati Soekarnoputri Government, among others, the obstacles to assistance from the central government to the Bali local government, the handling of legislation did not yet exist, limited hospital installations, reconstruction and normalization in the tourism sector had not yet been implemented. recovered for tourism promotion.

**Keywords:** Government, Handling, Bali bomb I.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam menjalankan program kerjanya terganggu dengan adanya peristiwa pengeboman di Indonesia. Program kerja yang bisa ditagih oleh bangsa Indonesia adalah masalah keamanan dan kenyamanan masyarakat dari ancaman aksi teror. Pemerintah Megawati mengambil langkah yang dilakukan adalah dengan penanganan tanggap darurat kepada korban dan rekonstruksi setelah penanganan selesai dilakukan. Dalam penyelesaian menanggulangi peristiwa Bom Bali I mengambil langkah-langkah yaitu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang lingkupnya adalah penanganan Bom Bali I. Setelah pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yaitu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan seluruh instansi yang memiliki tugas meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian. Setelah Inpres Nomor 4 mendukung kebijakan pemerintah berisi pemberian otoritas kepada Badan Intelijen Negara untuk mengkoordinasikan kegiatan penanganan korban (Inpress, 2002).

Pemerintahan telah menetapkan upaya penanganan dan pemulihan kondisi Bali. Tahapan ini sesuai dengan kerja yang dilakukan pemerintah sehingga Presiden Megawati Soekarnoputri mengintruksikan ada tiga tahap dalam proses recovery. Pertama, adalah upaya tanggap darurat yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2002. Tahap ini merupakan tahap awal pemulihan terhadap korban dengan pertolongan ke rumah sakit. Tahap selanjutnya yaitu rekonstruksi yaitu membangun kembali infrastruktur, pariwisata, dan perekonomian masyarakat. Tahap pembangunan kembali dilaksanakan pada tahun 2003.

Bom Bali I merupakan aksi pengeboman pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi di Legian, Bali. Pengeboman tersebut terjadi di berbagai tempat di jam yang berbeda. Tempat tersebut adalah Paddy's Pub, Sari Club dan Konsulat Amerika Serikat dengan jumlah korban sebanyak 202 jiwa. Korban yang meninggal dunia berasal dari berbagai negara antara lain Indonesia (38

orang),

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sejarah ialah proses menguji dan menganalisa secara runtut terkait data rekaman maupun peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1985). Penelitian sejarah digunakan dalam menunjukkan fakta sejarah menjadi cerita yang benar adanya. Terdapat langkah-langkah penelitian, yaitu: 1 heuristik, 2 kritik, 3 interpretasi, dan 4 historiografi. Dalam cakupan pembahasannya, penulis menggunakan macam - macam metode yang di cocok dengan permasalahannya. Adapun langkah - langkahnya antara lain:

Tahap pertama, yaitu langkah penelitian heuristik atau pengumpulan sumber. Pada langkah ini peneliti mencari sumber-sumber terkait dengan masalahnya yang ada di bab pembahasan. Oleh karena itu, sumber yang didapatkan harus benar-benar valid atau benar adanya, contohnya bisa berupa koran, buku tulis, dokumen dan peneliti terdahulu sebab sumber yang berhasil dicari akan menjadi sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sumber dibagi kedalam dua bentuk antara lain primer dan sekunder. Sumber primer bisa dicontohkan kedalam bentuk laporan lembaga donor luar negeri seperti World Bank. Selain laporan terdapat sebuah peraturan alam bentuk Instruksi Presiden yang di sah kan oleh Presiden Megawati. Dikatakan sumber primer karena keputusan ini keluar setelah pasca peledakan bom (Gottschalk, 1985).

Tahap kedua adalah kritik sumber penelitian sejarah. Seusai mendapat atau mengumpulkan data, maka tahap berikutnya adalah mencari sumber yang valid terkait fakta yang ada baik sumber primer maupun sekunder yang akan timbul pengkritikan (Sjamsuddin, 1996). Pada langkah ini, penulis melakukan percobaan terkait keabsahan sumber dan keaslian sumber dengan melakukan kritik luar dan dalam (Abdurahman, 2007). Langkah yang dilakukan kritik luar adalah dengan menyeleksi data atau dokumen yang didapatkan dengan cara memilah kertas, tinta maupun tulisan yang digunakan. Setelahnya peneliti atau penulis mencari data terkait pembuatan sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan keasliannya. Pada kritik luar peneliti diuji juga bidang jurnal dan sumber dokumen.

Langkah berikutnya adalah analisis data atau interpretasi, menurut Kuntowijoyo (1995) dalam bukunya ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu: analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatuhkan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklarifikasikan menurut jenisnya dan disintesis agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

Tahap terakhir peneliti melakukan historiografi atau penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Historiografi adalah kegiatan akhir dari tahap peneliti sejarah yang merupakan hasil kegiatan pembangunan kembali secara imajinatif dari masa lalu hingga masa sekarang agar dapat menemukan data yang sesuai dengan fakta sejarah (Gottschalk, 1985). Historiografi atau penulisan sejarah merupakan suatu cara untuk membangun kembali suatu gambaran masa lalu berdasarkan data yang dihasilkan. Pada langkah ini penulis mencoba menyiapkan hasil data yang telah disajikan dalam bentuk dokumen dalam bentuk skripsi sehingga penulisan skripsi ini sesuai dengan fakta yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Dalam Menangani Akibat Peristiwa Bom Bali I Tahun 2002**

Peristiwa bom Bali I membuat masyarakat Bali mengalami kerugian hampir diseluruh bidang. Pengeboman yang terjadi tiga kali, dua bom meledak di kawasan Legian Kuta (Kafe Sari Club dan Paddy's Pub) dan satu ledakan terjadi di kawasan Renon Denpasar (di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat). Upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penanganan tanggap darurat, rekonstruksi dan normalisasi sektor pariwisata. Selanjutnya beberapa upaya perbaikan akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

## **Penanganan Tanggap Darurat**

### **1. Evakuasi Korban**

Upaya penanganan korban dilakukan oleh Tim Bambang Agus Priyatno dan Kapolda Bali Bridgen Budi Setiawan. Penanggulangan bencana di jalan Legian cukup cepat. Respon masyarakat setempat membantu korban ke Rumah Sakit Sanglah dengan mobil ambulance. Dalam situasi tanggap darurat, rumah sakit memberikan bantuan berupa pertolongan pertama dalam upaya penyembuhan fisik dan psikologis korban. Korban meninggal mencapai 202 orang dan di Rumah Sakit Graha Asih sebanyak 73 orang luka-luka/meninggal. Korban yang meninggal dari 21 negara termasuk warga negara Australia (88 orang), Indonesia (38 orang), warga negara Inggris (24 orang), Amerika Serikat (7 orang), Jerman (6 orang), dan 39 orang belum ditemukan identitasnya.

Penanganan evakuasi pemulihan korban dibantu oleh Palang Merah Indonesia. Kegiatan PMI bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Sanglah untuk mengamankan korban. Hal ini dibantu oleh dr. Kuning merupakan ketua tim trauma Rumah Sakit Sanglah yang menangani korban (Organization of World Heritage Cities, 2003).

### **2. Perawatan Korban**

Tindakan penanganan korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah Bali. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Graha Asih untuk mendapat pelayanan maksimal. Proses pengobatan diberikan untuk para korban beserta keluarga yang terkena dampak ledakan. Terdapat juga penyuluhan donasi obat dilakukan melalui Rumah Sakit Sanglah sebagai rumah sakit koordinator perawatan korban bom Bali. Evakuasi korban dilakukan di Legian, Kuta Bali melalui surat keputusan Gubernur Bali Nomor 464/03-K/HK/2002 tanggal 4 November 2002. Proses bantuan datang dari pihak Rumah Sakit Sanglah untuk merawat korban pasien terapi dengan melakukan pelayanan rawat inap. Pemulihan dilakukan

dengan mewajibkan untuk konseling seminggu sekali (Erviani, 2017).

### 3. Koordinasi Keluarga Korban

Kekerabatan antara keluarga korban menimbulkan rasa kehilangan dari keluarga korban. Pihak rumah sakit berusaha menghubungi keluarga korban melalui masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya pemulihan trauma terhadap keluarga korban yang kehilangan orang tersayang akibat aksi teror. Korban dan keluarga korban bom Bali I membangun komunitas dengan nama Istri Suami Anak Dewata (Isana Dewata). Yayasan Isana Dewata yang diketuai oleh Ni Luh Erniawati. Yayasan ini sebagai wujud simpati atas meninggalnya para korban serta menggelar doa bersama, menabur bunga dan menyalakan lilin sebagai simbol duka. Setiap tanggal 12 Oktober keluarga korban memperingati tragedi ledakan tujuannya yakni mengenang korban pengeboman serta pendamping keluarga korban yang ditinggalkan karena tragedi bom Bali. Yayasan Isana Dewata merupakan paguyuban yang menaungi korban bom Bali.

## **Rekontruksi Wilayah Pengeboman**

### 1. Perbaikan Sarana Prasarana

Pembangunan kembali dicanangkan oleh pemerintah daerah pasca ledakan diatur dalam Keputusan Dalam Negeri No. 131 Tahun 2003. Keputusan tersebut berisi penanganan bencana pengungsi wilayah masyarakat Bali. Cakupan rekontruksi diantaranya mencakup cafe, disko, dan hotel. Rencana pemulihan meliputi perumusan konsep yang diatur dalam perundang-undangan yang menjadi kebijakan umum. Perbaikan sarana pariwisata Paddy's Pub, dan Sari Club merupakan bangunan yang terdampak ledakan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Bali dalam memperbaiki jalan Legian, cafe Paddy's Pub, dan Sari Club merupakan bantuan dari Bali Rehabilitation Fund. Dana Rehabilitasi Bali pada bulan April sejumlah 750.000 sampai 1.5 juta US Dollar dialokasikan untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat melalui BRF (BRF, 2003).

## 2. Pemulihan Kejiwaan (Traumatik)

Pemulihan korban tidak hanya terjadi pada fisik korban melainkan kondisi mental menjadi perhatian serius. Keadaan psikis korban menyebabkan rasa trauma bagi korban. Upaya dilakukan dengan pemulihan psikologis untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, serta memulihkan kembali kehidupan masyarakat pada keadaan sebelum bencana. Penanganan yang pertama adalah penyembuhan pada kejiwaan korban (Ashiddiqi, 2009).

Gejala stres pasca trauma atau Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) merasa panik dipicu dengan perasaan yang dialami para korban. Pemulihan psikologis dilakukan di Rumah Sakit oleh dr. Denny Thong dan dr. Made Nyandra serta satu dokter umum yakni dr. Pande Sura Oka berasal dari Jakarta bekerja sama dengan staf IMC-Bali untuk melakukan pendampingan kejiwaan kepada korban (Erviani, 2017).

## Normalisasi Sektor Pariwisata

### 1. Normalisasi Dalam Bali

Upaya yang dilakukan dalam menormalkan pariwisata khususnya dibidang pembangunan dan promosi wisata. Langkah yang dilakukan dengan diadakannya berbagai acara yakni MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition) dan Festival (Sanur Village Festival) digelar tahun 2006. Dengan adanya kegiatan ini, normalisasi pariwisata terutama di industri pariwisata menjadi bagian public relation untuk negara Indonesia. Upaya normalisasi selain MICE terdapat juga festival seperti Sanur Village Festival merupakan lembaga pemberdayaan desa yang menaungi berbagai aktivitas masyarakat. Event Sanur Village Festival menampilkan beraneka ragam kesenian tari baris, beleganjur, kompetisi juking, festival makanan, pawai budaya, dan panggung hiburan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menarik sejumlah wisatawan dari negara asing ke Sanur. Pemerintah dapat mengadakan *press conference* bersama Yayasan Pembangunan Festival Sanur dengan potensi meningkatkan

kunjungan wisatawan setiaptahunnya (Fariska dkk., 2019:132).

## 2. Normalisasi Luar Bali

Normalisasi wisata Bali perlu adanya pemulihan pada sektor perekonomian pariwisata. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan cara menjaga Keamanan dan kenyamanan wisatawan asing. Keselamatan wisatawan asing menjadi prioritas utama dalam hal normalisasi pariwisata. Pemerintah Indonesia meluncurkan program pemulihan yang di susun oleh Badan Pariwisata Bali (BTB). Program ini merupakan langkah penegakan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi wisatawan mancanegara. Pelaksanaan event internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IX dan Iklan Cable News Network (CNN) yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung tanggal 7-8 Oktober 2003. Salah satu acara yang dilakukan adalah Presiden Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan para tamu pimpinan negara Jepang, Cina, Korea Selatan dan India di Istana Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Untuk membicarakan tentang pulihnya kembali pariwisata Indonesiakhususnya Bali (Kompas, 2003)

## **Hambatan Yang Dihadapi Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Dalam Penanganan Peristiwa Bom Bali I Tahun 2002**

Setiap langkah yang dilakukan pemerintah tidak selalu sesuai dengan usaha yang diharapkan. Kendala yang terjadi sehubungan dengan pemulihan mekanisme pertahanan dan ketahanan. Tantangan dari Bali sendiri adalah memajukan pembangunan sumber daya yang hancur. Hal ini merupakan hambatan di tengah kesulitan stabilitas dan normalisasi tragedi ledakan bom Bali. Peningkatan ketahanan bertujuan untuk merencanakan manajemen agar dapat menanggapi bahaya ancaman. Penyelesaian hambatan tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini.

### **Permasalahan Pembangunan Infrastruktur**

#### 1. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah



Masalah pada era pemerintahan Megawati ditandai dengan banyaknya kasus pengeboman diwilayah Indonesia salah satunya Bali. Koordinasi tergantung pada komunikasi antara pusat dan daerah dalam menangani pembangunan sektor pariwisata (Nurjannah, 2017). Penanganan sektor pariwisata yang tidak sinkron menyebabkan proses penyelesaian tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hambatan yang perlu ditangani berupa infrastruktur seperti jalan dan transportasi yang rusak. Hambatan utama untuk mencapai ketahanan sosio ekonomi yang lebih banyak adalah sumber daya manusia, material dan keuangan karena industri pariwisata menghasilkan sumber pendapatan.

Upaya yang dilakukan ialah melakukan perbaikan pariwisata dibidang keamanan untuk membantu menarik kembali perhatian wisatawan ke Bali. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang pembangunan berkaitan dengan industri pariwisata berfokus pada keuntungan ekonomi (Bisnis Indonesia,2002).

## 2. Penyaluran Dana Bantuan

Penggunaan dana bantuan pembangunan sektor pariwisata menjadi masalah bagi pemerintah Bali untuk memulihkan infrastruktur. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kewenangan terutama dalam industri pariwisata pasca bom Bali. Pemerintah daerah Bali mengeluarkan dana Rp. 2,5 triliun pada 2001. Pemulihan yang dilakukan pada Juli tahun 2003 pihak Departemen Keuangan memberitahukan bahwa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai Rp. 341 milyar (World Bank, 2003).

Selain penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, ada juga bantuan dari negara Jepang yakni Perdana Menteri Junichiro Koizumi kepada pemerintah Indonesia khususnya untuk Bali sebesar 26 juta US Dollar (sekitar 234 milyar). Bantuan tersebut sebagai bantuan darurat untuk membantu pemulihan pembangunan sektor pariwisata (Tempo, 2003).

## **Permasalahan Travel Warning**

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Travel Warning**

Travel Warning merupakan kebijakan pemerintah dari suatu negara untuk memberikan informasi mengenai larangan perjalanan ke luar atau dalam negeri. Beberapa negara asing salah satunya Australia mengandalkan industri pariwisata untuk perekonomian masyarakatnya. Pariwisata mempengaruhi perubahan budaya dan hubungan internasional dalam bentuk wisata yang unik dari suatu negara sebelum ledakan di Bali. Untuk kondisi pasca ledakan memang menjadi hambatan dalam dunia pariwisata (LIPI, 2007). Menghadapi peristiwa ini pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengembalikan citra Bali dengan hubungan diplomasi dengan negara asing yang bersifat regional dibidang PATA (*Pasific Asian Travel Association*).

### **2. Tanggapan Negara Luar Terhadap Travel Warning**

Reaksi warga negara asing terkait larangan perjalanan untuk berwisata untuk bepergian. Sejumlah negara memberikan informasi tentang bahaya perjalanan ke Indonesia khususnya Bali. Masalah ini membuat masyarakat takut untuk melakukan wisata ke luar. Penjagaan keamanan di Bali merupakan bagian penting dari kenyamanan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah aksi teror terulang kembali. Peningkatan Keamanan dilakukan agar sebuah negara atau kota menjadi aman. Upaya yang dilakukan ialah memperkuat hubungan diplomasi anti terorisme pemerintah Indonesia dengan penguatan legal formal, institusional, dan praksis. Secara legal formal Indonesia telah berupaya memperkuat regulasi nasional dengan membuat berbagai peraturan baru terkait penanggulangan aksi teror (Wuryandari, 2014).

## **Dampak Pemulihan Yang Dilakukan Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Akibat Peristiwa Bom Bali I Tahun 2002**

Penanganan peristiwa bom Bali I berdampak pada beberapa sektor. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya sektor pariwisata dan ekonomi

masyarakat sekitar. Tidak hanya sektor pariwisata tetapi pada sektor perekonomian pasca penanganan masih belum membaik. Kedua dampak diatas akan dijelaskan dibawah ini.

## **Pemulihan Sektor Pariwisata**

### **1. Daya Tarik Wisata**

Pariwisata merupakan salah satu industri di Indonesia mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang berperan dalam pendapatan daerah. Melihat adanya potensi wisata menjadi sebuah aset bagi perkembangan pariwisata di Indonesia khususnya pulau Bali. Bali merupakan pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya sehingga menjadi tempat bagi wisatawan asing untuk berlibur (Elizabeth, 2015). Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kesra melakukan berbagai upaya antara lain pertemuan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan Pariwisata dan kepolisian. Untuk bisa mengembalikan citra Bali dibutuhkan waktu yang tidak sedikit sebab sangat sulit untuk melupakan tragedi pengeboman di Kuta (Candra, 2012).

### **2. Promosi Wisata**

Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dikatakan mengalami penurunan setelah terjadinya ledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 di Kuta. Peran Disparda dalam upaya pemulihan promosi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bali, lembaga pariwisata, dan masyarakat. Target yang ingin dicapai dalam promosi pariwisata Bali adalah untuk menyebarkan informasi kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (Mahagangga dkk., 2012). Adapun upaya konkrit yang dilakukan Disparda dalam pemulihan pariwisata pasca bom sebagai bagian dari kebijakan yang diterapkan adalah (i) upaya pemulihan keamanan berkoordinasi dengan Polda, (ii) upaya promosi dengan melibatkan lembaga BTB, PHRI, stakeholder pariwisata.

### 3. Fasilitas Penunjang

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu proses pemulihan Bali merupakan prioritas utama untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan pemerintah dengan melakukan kegiatan monitoring dan program penanggulangan fasilitas umum. Fasilitas yang disediakan berupa hotel bintang lima. Angka hunian hotel tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang arus wisatawan ke Bali. Gambaran yang komprehensif tentang tamu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara diolah dari data angka hunian hotel. Hotel mewah berhasil menaikkan angka hunian 40 persen antara bulan Desember 2002 dan Maret 2003. Tidak hanya fasilitas keamanan pariwisata tetapi terdapat Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut (BBRPBL) merupakan salah satu fasilitas yang menjadi andalan bagi wisata laut dan perikanan di Bali (Suara Pembaruan, 2003).

### 4. Arus Wisatawan

Peristiwa bom Bali merupakan tragedi bagi sektor pariwisata di Indonesia yang menyebabkan devisa negara menurun. Dalam jangka pendek kunjungan wisatawan asing akan berkurang. Penerimaan devisa yang hilang tahun 2002 dan 2003 tergantung dari banyaknya wisatawan yang tidak berwisata ke Indonesia. Upaya perbaikan disektor pariwisata membaik dengan adanya pulihnya kepercayaan dan keamanan untuk berwisata. Adapun event musik dan kesenian tradisional dilakukan untuk memulihkan wisata untuk mempromosikan nilai-nilai yang dimiliki oleh Bali dalam dunia pariwisata.

## **Pemulihan Sektor Ekonomi**

### 1. Perdagangan

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali membuat aktivitas ekonomi Bali menjadi bergerak maju. Berbagai peluang usaha yang berkaitan dengan pariwisata mulai tumbuh akibat normalnya aktivitas penginapan seperti hotel, restoran hingga jasa pariwisata seperti biro

perjalanan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan produk domestik daerah bruto. Sektor usaha dari produk domestik daerah bruto merupakan penyokong ekonomi daerah karena berperan sebagai lapangan usaha bagi masyarakat. Perekonomian Bali dibantu oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat terjadi pada tahun 2002 sebesar 18,16 persen. Namun pada tahun 2003 menurun menjadi 9,69 persen dikarenakan dampak dari tragedi bom Bali I (Parameswara & Wulandari, 2019).

## 2. Jasa Transportasi

Pulau Bali merupakan tujuan wisata internasional menyangkut kegiatan perjalanan wisata, pemasaran dan promosi wisata. Dalam hal ini transportasi luar negeri khususnya negara yang dekat dengan Indonesia sangat berperan dalam mendukung perjalanan wisatawan mancanegara ke Bali. Jasa transportasi udara merupakan salah satu pilihan bagi para wisatawan mancanegara untuk melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya Bali. Sarana transportasi udara menjadi salah satu pelayanan terhadap penumpang yang lebih efisien (Pitana & Gayatri, 2005).

## 3. Tempat Penginapan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama perekonomian Bali. Merosotnya ekonomi Bali dapat dipahami dengan struktur perekonomian yang ada di Pulau Dewata bergantung pada sektor pariwisata yang hampir 75% dari 3.5juta penduduk terlibat dalam ekonomi pariwisata salah satunya jasa penginapan. Jasa penginapan di Bali terdapat 1.368 hotel dan 1.255 diantaranya adalah hotel berbintang. Jumlah kamar yang tersedia mencapai 36.555 unit. Penurunan kunjungan wisatawan asing seperti Australia, Jepang, Belanda, Amerika menginap di hotel Simpang Inn. Sedangkan wisatawan nusantara yakni berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Simpang Inn Hotel merupakan salah satu hotel melati yang berlokasi di jalan Legian No 133 Kuta, Kabupaten Badung

yang ikut bersaing untuk mencari pangsa pasar wisatawan yang berlibur ke Bali khususnya ke Kuta Badung.

## **Kesimpulan dan Saran**

Upaya pemerintah Megawati Soekarnoputri dalam menangani akibat peristiwa bom Bali I yakni menetapkan beberapa upaya penanggulangan bencana antara lain tahap penanganan tanggap darurat, rekonstruksi wilayah pengeboman dan normalisasi sektor pariwisata. Tahapan pertama, fase tanggap darurat dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2002 yang meliputi evakuasi korban, perawatan korban dan koordinasi keluarga korban. Tahap rekonstruksi dilaksanakan tahun 2003 dengan sasaran sarana prasarana seperti cafe, disko, hotel. Tahap normalisasi dilakukan setelah tanggap darurat yang dimulai tahun 2006 dengan acara MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) dan Sanur Village Festival. Dari ketiga fase tersebut Pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengambil langkah-langkah dalam upaya pemulihan trauma para korban aksi teror.

Hambatan yang dihadapi pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam menangani peristiwa bom Bali I tahun 2002 yaitu (1) permasalahan pembangunan infrastruktur dan (2) permasalahan travel warning. Kedua permasalahan tersebut diatasi oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Hambatan pertama ditangani dengan masalah koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tidak sinkron sehingga menyebabkan penanganan menjadi sulit terlaksana. Hambatan kedua dilakukan oleh pemerintah melarang warganya untuk melakukan perjalanan ke luar dan dalam dengan diterapkannya travel warning. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengatasi 2 hambatan yang terjadi saat penanganan peristiwa bom Bali I. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan sehingga berjalan dengan baik dalam proses rekonstruksi dan keamanan.

Dampak pemulihan yang dilakukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri akibat peristiwa bom Bali I tahun 2002 berdampak pada pemulihan sektor

pariwisata dan ekonomi. Dampak pemulihan yang diperoleh adalah semakin majunya sektor pariwisata dan perekonomian pemerintah Bali dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada penanganan pemulihan peristiwa bom Bali I. Dampak lain yang dihasilkan dari pemulihan ini adalah untuk masyarakat Bali. Kondisi pasca ledakan membuat ekonomi menjadi menurun. Maka perlu adanya pemulihan seperti promosi pariwisata agar mengembalikan image Bali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ashiddiqi, H. (2009). Bantuan Hukum dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Bom Bali, Bom Kedutaan Australia, dan Bom Hotel Marriot Jakarta). *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bisnis Indonesia. (2002). *Dukungan Kebijakan Pariwisata Bali Setengah Hati*. Jember 10 Juli. Halaman 44.
- BRF. (2003). Bali Rehabilitation Fund Doubled. <https://www.theage.com.au/national/bali-rehabilitation-fund-doubled-20031012-gdwj21.html> [Diakses pada 15 September 2021].
- Candra, D. (2012). Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Pasca Bom Bali tahun 2002-2009. *Skripsi*. Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Elizabeth, J. (2015). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan Mancanegara Pasca Bom Bali I Tahun 2002. *Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur*. 3(1): 79-87
- Erviani, N. K & Lea, A. A. (2017). *Luka Bom Bali (kisah nyata dari bom Bali)*. Bali: PT. Percetakan Bali.
- Fariska, I. G. P. Dkk. (2019). Pengaruh Brand Image Terhadap Motivasi dan Minat Wisatawan Domestik Berkunjung ke Sanur Village Festival. *Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana*. 7(2): 125-128.

Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto*. Jakarta: UI Press.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. *Langkah-Langkah Operasional yang Meliputi Aspek Penangkalan, Pencegahan, Penanggulangan, Penghentian, Penyelesaian dan Segala Tindakan Hukum*. 22 Oktober 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107. Jakarta.

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bentang

Pustaka. Kompas. (2003). *Pariwisata Bali Belum Pulih*. Jember 10 Juli. Halaman 34.

Koran Tempo. (2003). Jepang Bantu US\$ 26 Juta untuk Atasi Dampak Bom Bali. <https://dunia.tempo.co/read/32365/jepang-bantu-us-26-juta-untuk-atasi-dampak-bom-bali> [Diakses pada 15 September 2021].

LIPI. (2007). Travel Warning Sangat Berpengaruh Terhadap Pariwisata. <http://lipi.go.id/berita/travel--warning-sangat--berpengaruh--terhadap--pariwisata/1570> [Diakses pada 15 September 2021].

Mahagangga, I, G, A & Sagita, P, A, W. (2012). Peran dan Kendala Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Bom (Suatu Kasus Disparda Provinsi Bali). *Fakultas Pariwisata Universitas Udayana*. 12(1): 62-77.

Nurjannah, I. R. A. (2017). Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004. *Skripsi*. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Organization of World Heritage Cities. (2003). 325 Orang Korban Hidup Bom Bali Dirawat Tim Trauma Rumah Sakit Sanglah Denpasar. <https://denpasarkota.go.id/berita/baca/635#!> [Diakses pada 15 September 2021].

Parameswara, A, G, A & Wulandari, I, G, A. (2019). Pengaruh Pendapatan per Kapita, Suku Bunga Bi Rate, Inflasi dan Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Simpanan Pihak Ketiga Pada Bank Umum di Provinsi Bali. *Universitas Warmadewa Denpasar*. 2(1): 10-17.

Pitana, I. G & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sjamsudin, H. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan



Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Suara Perbaruan, ( 2003). Wisata Teknologi Kelautan di Bali. Jember 10 Juli.  
Halaman 44.

World Bank. (2003). *Bali Beyond the Tragedy: Impact and Challenges for Tourism-led Development in Indonesia*. Universitas Michigan.

Wuryandari, G. (2014). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 11(2): 71-83.